

Menguji Narasi Anti Korupsi dalam Larangan THR dengan Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk

Agung Setia Budi¹, Agus Hamdani²

^{1,2}Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut, Indonesia
E-mail: setiabudia785@gmail.com¹, gushamdan69@gmail.com²

Article History:

Received: 18 Maret 2025

Revised: 01 Mei 2025

Accepted: 05 Mei 2025

Kata Kunci : *Analisis Wacana Kritis, Teun A. Van Dijk, Berita Online*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis empat berita terkait larangan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pemerintah dan pengusaha oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk. Model ini mengkaji struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro dalam teks berita. Struktur makro menyoroti tema utama tentang pencegahan pungutan liar dan penegakan integritas pemerintahan. Superstruktur menunjukkan pola penyajian berita yang sistematis, dari pemaparan larangan hingga urgensi kebijakan. Struktur mikro menyoroti pemilihan kata dan kalimat yang memperkuat sikap tegas pemerintah terhadap praktik permintaan THR yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis wacana. Data diperoleh dari empat berita yang dianalisis berdasarkan model Van Dijk untuk memahami bagaimana teks berita dikonstruksi serta dipengaruhi oleh konteks sosial dan ideologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat berita membangun narasi yang memperkuat legitimasi kebijakan Dedi Mulyadi dalam menegakkan pemerintahan yang bersih. Penyajian fakta yang jelas, kutipan langsung, serta gaya bahasa tegas menunjukkan bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap isu ini. Penelitian ini memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana teks berita diproduksi dan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap fenomena sosial yang diberitakan.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi telah menjadi fenomena yang tak dapat dihindari. Media massa memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti menyampaikan berbagai berita dari berbagai daerah. Media massa ini mencakup surat kabar, majalah, radio, televisi, serta film. Apalagi, dengan hadirnya media *online* yang mudah diakses, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin terpenuhi sejak awal perkembangan media massa itu sendiri. Informasi yang disajikan dapat menjadi kekuatan bagi pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam perannya sebagai lembaga yang memproduksi dan menyebarluaskan informasi, media menjadi alat yang strategis untuk membentuk opini publik sesuai dengan ideologi tertentu.

Melalui media, suatu paham atau ideologi dapat diperkuat, baik yang bersifat positif maupun negatif (Eriyanto, 2011). Namun, berita yang disajikan oleh media sering kali bukanlah fakta murni, melainkan hasil rekonstruksi realitas yang telah disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, media bukanlah sarana yang netral dalam menyampaikan fakta kepada masyarakat.

Salah satu bentuk media massa adalah surat kabar yang menggunakan bahasa tulis sebagai alat komunikasi. Dalam penggunaan bahasa tulis ini, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian karena informasi yang disampaikan tidak selengkap komunikasi lisan. Oleh karena itu, terkadang terdapat perbedaan antara informasi yang dimuat di surat kabar dengan kenyataan yang terjadi. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemampuan penulis dalam menyusun wacana yang dimuat di media massa.

Menurut Baryadi (2002), istilah wacana digunakan dalam bidang linguistik. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap, baik secara lisan maupun tulisan, yang memiliki unsur kohesi, koherensi, serta kesatuan makna. Wacana juga mencerminkan hasil interaksi sosial yang dapat dipahami oleh pembaca (Sumarlam, 2019; Harimurti, 2008; Humaira, 2018). Wacana lebih berfokus pada teks tertulis yang memiliki struktur berita tentang suatu peristiwa yang dimuat di surat kabar (Coulthard M., 1979; Badara A, 2012).

Untuk mengungkap ideologi yang sengaja ditanamkan oleh media tertentu, bahasa menjadi unsur kunci dalam membongkar ideologi yang terkandung dalam sebuah media. Berita yang disajikan oleh media bukan sekadar cerminan dari peristiwa yang terjadi, melainkan juga mengandung nilai-nilai yang dianut oleh lembaga media tersebut (Darma, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis.

Kridalaksana (2013) menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa paling lengkap dalam hierarki gramatikal yang tertinggi. Sebagai satuan bahasa yang utuh, wacana mengandung konsep, gagasan, serta ide yang dapat dipahami oleh pembaca dalam bentuk tulisan atau pendengar dalam bentuk lisan. Karena menggunakan perspektif kritis, maka pendekatan ini disebut analisis wacana kritis.

Menurut Darma (2009), analisis wacana kritis merupakan upaya atau proses untuk menjelaskan teks (realitas sosial) yang sedang atau ingin diteliti oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu untuk mencapai kepentingan tertentu. Sementara itu, Lukman (2006) menjelaskan bahwa analisis wacana kritis bekerja lebih mendalam dibandingkan analisis wacana biasa. Pendekatan ini berusaha mengungkap alasan di balik struktur wacana yang pada akhirnya berkaitan dengan analisis hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam wacana tersebut. Tujuan utama analisis wacana kritis adalah menjelaskan dimensi linguistik dalam fenomena sosial dan budaya serta memahami proses perubahan di era modern saat ini (Jørgensen & Phillips, 2007).

Media informasi kini telah bertransformasi menjadi media daring yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial. Hal ini menjadikan media *online* sebagai sarana yang paling efektif dalam menyampaikan informasi yang dikemas dalam bentuk wacana kepada publik, baik oleh individu, kelompok, maupun instansi pemerintah.

Menurut Baryadi (2002), istilah wacana dan *discourse* digunakan dalam ranah linguistik. Wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap dalam hierarki gramatikal, sehingga dapat dipahami oleh pembaca, baik dalam bentuk percakapan lisan maupun tulisan, yang mencerminkan hasil interaksi sosial (Kridalaksana, 2008; Purwoko, 2008). Istilah teks lebih merujuk pada lisan, sedangkan wacana mengacu pada tulisan yang memiliki struktur berita tentang suatu peristiwa yang dipublikasikan melalui surat kabar (Coulthard, 1979; Badara, 2012).

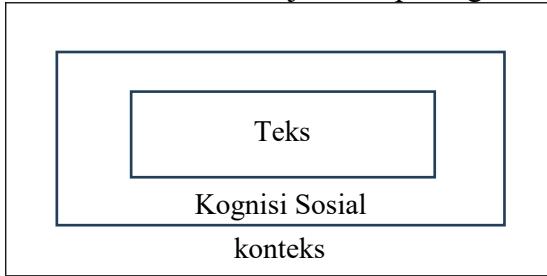
Produksi wacana sangat dipengaruhi oleh latar belakang penulis (Hermina, 2014; Payyusa,

2017). Perbedaan sudut pandang media memungkinkan kita untuk melihat adanya ketimpangan, keberpihakan, serta motif tersembunyi di balik teks berita. Oleh karena itu, dengan menganalisis wacana, kita dapat mengungkap ideologi yang tersembunyi di balik teks tersebut.

Analisis wacana kritis berfokus pada penggunaan bahasa untuk menjelaskan teks (realitas sosial) yang diteliti. Tujuan utama dari analisis ini adalah mengungkap hubungan antara bahasa, masyarakat, kekuasaan, ideologi, nilai, dan pendapat (Brown & Yule, 1984; Suwandi, 2008; Darma, 2009; Rahimi & Riasati, 2011).

Analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) bertujuan untuk membongkar sumber dominasi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Analisis ini juga berperan sebagai kritik terhadap perkembangan linguistik, sosiologi, dan budaya dalam domain sosial, serta menjelaskan dimensi linguistik dalam fenomena sosial dan kultural (Lukmana, 2006; Jorgensen & Phillips, 2007; Rashidi & Souzandehfar, 2010).

Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk. Van Dijk membagi wacana ke dalam tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari analisis ini adalah menggabungkan ketiga dimensi tersebut dalam satu kesatuan analisis. Model dari analisis Van Dijk ini dapat digambarkan sebagai berikut ini.



Gambar 1. Model Analisis Van Dijk

Penelitian tentang analisis wacana kritis telah banyak dilakukan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Adetunji (2006), Imam (2012), Lado (2014), Albaburrahim (2017), dan Humaira (2018). Misalnya, Adetunji meneliti penggunaan deiksis dalam wacana politik, sementara Imam menggunakan model Van Dijk untuk menganalisis lagu. Lado meneliti program “Mata Najwa” di Metro TV, dan Albaburrahim menganalisis kasus “Papa Minta Saham” dengan metode Fairclough. Penelitian yang paling relevan adalah penelitian Humaira yang menganalisis berita di surat kabar Republika menggunakan model Van Dijk.

Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada lima media *online*, yaitu kompas.com, detik.news.com, metrotvnews.com, dan sindo.com. Objek yang diteliti adalah wacana tentang kasus penipuan travel umrah untuk memahami bagaimana analisis wacana kritis model Van Dijk diterapkan pada berita-berita tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dokumentasi dan analisis isi teks media *online*. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan, transkrip, majalah, agenda, serta berbagai sumber tertulis lainnya (Arikunto, 2013). Fokus penelitian ini adalah wacana berita *online* yang membahas kasus “*Gubernur Jabar Bakal Tindak Tegas Oknum yang Minta THR ke Pejabat dan Pengusaha*”.

Data yang diperoleh dari wacana berita *online* ini dijadikan bukti dalam penelitian, yang dianalisis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi (Arikunto, 2013). Penelitian ini menerapkan model analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk yang bertujuan untuk mengkaji fenomena sosial dalam masyarakat (Eriyanto, 2009).

Subjek penelitian ini adalah media *online* yang memiliki jumlah pembaca tinggi, yaitu liputan6.com, okezone.com, kompas.com, dan metronews.com. Sementara itu, objek penelitian adalah wacana mengenai “*Gubernur Jabar Bakal Tindak Tegas Oknum yang Minta THR ke Pejabat dan Pengusaha*” yang menjadi perbincangan luas di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan tiga dimensi dalam model Van Dijk, yaitu:

1. Struktur Makro (Tema utama atau makna global dalam teks).
2. Superstruktur (Bagaimana bagian-bagian teks tersusun secara sistematis).
3. Struktur Mikro (Analisis elemen-elemen kecil dalam teks, seperti semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak digunakan untuk mengamati fenomena penggunaan bahasa dalam berita, sedangkan teknik catat dilakukan dengan mencatat data yang relevan untuk dianalisis (Mahsun dalam Santoso, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data dengan cara menyimak dan mencatat berita yang berkaitan dengan kasus “*Gubernur Jabar Bakal Tindak Tegas Oknum yang Minta THR ke Pejabat dan Pengusaha*”.

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Reduksi data (Memilah data yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak diperlukan).
2. Penyajian data (Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman).
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Menganalisis serta menginterpretasikan data untuk menemukan pola dan makna dalam wacana).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ideologi yang terkandung dalam berita-berita terkait kasus “*Gubernur Jabar Bakal Tindak Tegas Oknum yang Minta THR ke Pejabat dan Pengusaha*”. Dalam konteks analisis wacana kritis, ideologi dapat tersembunyi dalam teks berita dan menjadi alat bagi pihak tertentu untuk membentuk opini publik (Darma, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana media massa merekonstruksi realitas sosial dalam pemberitaan dan bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi persepsi masyarakat.

Tabel 1. Data yang Dianalisis

No	Judul Berita	Media	Waktu Terbit	Link Berita
1	Dedi Mulyadi Melarang Ormas Minta Jatah THR ke Pemerintah dan Pengusaha	Liputan6.com	18 Maret 2025	https://www.liputan6.com/regional/read/5965626/dedi-mulyadi-melarang-ormas-minta-jatah-thr-ke-pemerintah-dan-pengusaha
2	Dedi Mulyadi: Ormas Tak Boleh Minta THR jika Ingin Pemerintah Bersih dari Korupsi	Kompas.com	17 Maret 2025	https://megapolitan.kompas.com/read/2025/03/17/19425781/dedi-mulyadi-ormas-tak-boleh-minta-thr-jika-ingin-pemerintah-bersih-dari
3	Jelang Lebaran, Dedi Mulyadi Tegaskan Dilarang Minta THR ke Pemda dan Perusahaan Swasta!	Okezone.com	17 Maret 2025	https://news.okezone.com/read/2025/03/17/525/3123368/jelang-lebaran-dedi-mulyadi-tegaskan-dilarang-minta-thr-ke-pemda-dan-perusahaan-swasta
4	Gubernur Jabar Bakal Tindak Tegas Oknum	Metronews.com	17 Maret 2025	https://www.metrotvnews.com/read/NA0CEwD9-gubernur-jabar-bakal-tindak-tegas-

No	Judul Berita	Media	Waktu Terbit	Link Berita
	yang Minta THR ke Pejabat dan Pengusaha			oknum-yang-minta-thr-ke-pejabat-dan-pengusaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Struktur Makro (Tematic)

a. Berita 1 “Dedi Mulyadi Melarang Ormas Minta Jatah THR ke Pemerintah dan Pengusaha”

Dalam berita ini, penulis menyoroti kebijakan Dedi Mulyadi yang secara tegas melarang organisasi masyarakat (ormas) meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pemerintah maupun pengusaha. Pelarangan ini didasarkan pada upaya menjaga profesionalisme dalam birokrasi dan dunia usaha, serta mencegah praktik-praktik yang dapat membuka celah penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya aturan ini, diharapkan ormas tidak lagi menekan pihak tertentu untuk memberikan THR secara tidak resmi, yang bisa berdampak pada ketidakseimbangan ekonomi dan moralitas birokrasi.

Selain itu, berita ini juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari langkah yang lebih luas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Penulis menyajikan kasus ini dengan mengangkat pernyataan Dedi Mulyadi sebagai tokoh yang berupaya membangun budaya etika dalam hubungan antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan demikian, berita ini tidak hanya berisi larangan semata, tetapi juga memberikan gambaran tentang pentingnya menjaga integritas dalam praktik sosial dan ekonomi.

b. Berita 2 “Dedi Mulyadi: Ormas Tak Boleh Minta THR jika Ingin Pemerintah Bersih dari Korupsi”

Berita ini menyoroti hubungan antara praktik permintaan THR oleh ormas dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa jika ingin menghilangkan korupsi dalam birokrasi, budaya meminta THR secara tidak resmi harus dihentikan. Permintaan semacam ini berpotensi menimbulkan relasi yang tidak sehat antara masyarakat dan pemerintah, di mana pejabat atau pengusaha merasa terpaksa memberi sesuatu yang tidak seharusnya, yang pada akhirnya bisa berkembang menjadi praktik gratifikasi atau suap.

Selain itu, penulis berita menyajikan informasi ini sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa perubahan sistem yang lebih bersih harus dimulai dari tingkat yang paling dasar. Jika budaya meminta-minta THR tetap dibiarkan, maka akan sulit untuk menghapus korupsi dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, berita ini memberikan wawasan bahwa menjaga integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat atau pengusaha, tetapi juga masyarakat luas, termasuk ormas yang sering berinteraksi dengan berbagai pihak dalam urusan sosial dan politik.

c. Berita 3 “Jelang Lebaran, Dedi Mulyadi Tegaskan Dilarang Minta THR ke Pemda dan Perusahaan Swasta!”

Menjelang perayaan Lebaran, berita ini mengangkat kembali larangan meminta THR yang ditegaskan oleh Dedi Mulyadi, khususnya kepada pemerintah daerah (Pemda) dan perusahaan swasta. Penulis menggarisbawahi bahwa menjelang hari raya, sering terjadi peningkatan permintaan THR oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan ormas atau lembaga sosial. Hal ini dinilai sebagai kebiasaan yang harus dihentikan karena dapat menciptakan beban bagi perusahaan dan instansi pemerintah, serta membuka peluang praktik yang tidak etis dalam hubungan sosial-ekonomi.

Dalam berita ini, ditekankan bahwa larangan tersebut bukan sekadar aturan formalitas,

tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem yang lebih adil dan transparan. Penulis menyajikan berita dengan memperkuat narasi bahwa perusahaan swasta dan pemerintah daerah harus beroperasi dengan prinsip profesionalisme, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Dengan pendekatan ini, berita ini memberikan gambaran bahwa menjaga integritas dalam urusan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas dan individu yang selama ini terbiasa meminta THR secara tidak resmi.

d. Berita 4 “Gubernur Jabar Bakal Tindak Tegas Oknum yang Minta THR ke Pejabat dan Pengusaha”

Dalam berita ini, penulis menyoroti langkah tegas yang akan diambil oleh Gubernur Jawa Barat terhadap oknum yang masih meminta THR kepada pejabat dan pengusaha. Ditekankan bahwa praktik ini bukan hanya dianggap sebagai kebiasaan buruk, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas guna memastikan bahwa tidak ada pihak yang memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan dalih THR.

Penulis berita mengangkat topik ini dengan menampilkan sisi ketegasan pemerintah dalam menjaga etika sosial. Berita ini tidak hanya melaporkan pernyataan gubernur, tetapi juga memberikan wawasan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan birokrasi dan bisnis yang lebih bersih. Dengan adanya ancaman tindakan tegas bagi pelanggar, diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya menjalankan prinsip transparansi dan profesionalisme dalam segala bentuk interaksi sosial, terutama yang melibatkan dunia usaha dan birokrasi.

2. Analisis Super Struktur (Skematik)

a. Berita 1 “Dedi Mulyadi Melarang Ormas Minta Jatah THR ke Pemerintah dan Pengusaha”

Analisis Super Struktur (Skematik) dari berita “Dedi Mulyadi Melarang Ormas Minta Jatah THR ke Pemerintah dan Pengusaha” berdasarkan alur penyusunan informasi dalam teks berita.

Penulis berita memulai wacana dengan mengangkat pernyataan Dedi Mulyadi yang secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pemerintah daerah maupun pengusaha. *“Tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor manapun,”* tegas Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Selasa (18/3/2025). Larangan tersebut dikaitkan dengan upaya mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. *“Ya kan kalau kita ingin dukung antikorupsi, pemerintahan yang bersih, ya enggak boleh ada permintaan-permintaan THR menjelang Lebaran,”* tambahnya. Penulis kemudian menjelaskan bahwa permintaan THR oleh ormas sering dilakukan dengan mengirimkan proposal yang mengatasnamakan organisasi mereka, dan praktik ini dianggap sebagai pungutan liar (pungli).

Pada bagian tengah berita, penulis menampilkan dampak negatif dari praktik permintaan THR ini, terutama terhadap pejabat pemerintahan. Dedi menyoroti bahwa kepala dinas dan wali kota sering kali mengalami tekanan akibat permintaan THR yang terus berdatangan menjelang Lebaran. *“Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing sama karena orang datang ke kantor, semuanya minta THR,”* ungkapnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada anggaran resmi yang diperuntukkan bagi pemberian THR kepada ormas atau LSM. *“Karena nanti akan mengambil dari yang bukan peruntukannya. Karena enggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, enggak ada,”* tandasnya. Pada bagian akhir, berita ditutup dengan pernyataan Dedi yang menegaskan pentingnya semua pihak berperan dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan. Ia

mengingatkan bahwa praktik pungutan liar dengan dalih THR harus dihentikan. “*Maka dari itu, mari kita semua dorong antikorupsi. Jangan ada lagi pungli dengan alasan THR,*” tegasnya.

b. Berita 2 “*Dedi Mulyadi: Ormas Tak Boleh Minta THR jika Ingin Pemerintah Bersih dari Korupsi*”

Analisis Super Struktur (Skematik) dari berita “*Dedi Mulyadi: Ormas Tak Boleh Minta THR jika Ingin Pemerintah Bersih dari Korupsi*”. Artikel ini dimulai dengan pernyataan Dedi Mulyadi yang menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) seharusnya tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada kantor pemerintahan maupun pelaku usaha. Ia menyoroti bahwa jika ormas benar-benar ingin mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, mereka tidak boleh melakukan praktik semacam ini. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kutipan langsung “*Ya kan kalau kita ingin dukung antikorupsi, pemerintahan yang bersih, ya enggak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang Lebaran,*” yang ia sampaikan dalam sebuah acara di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi. Dalam paragraf berikutnya, berita menyoroti fenomena tahunan di mana banyak ormas atau individu mendatangi kantor pemerintah untuk meminta THR, padahal anggaran THR bagi pejabat hanya dialokasikan untuk keluarganya.

Di bagian tengah, berita berfokus pada dampak yang ditimbulkan jika permintaan THR dari ormas terus dibiarkan. Dedi mengingatkan bahwa pejabat yang tetap memberikan THR kepada pihak luar kemungkinan besar akan mengambil dana dari pos yang tidak semestinya, yang pada akhirnya bisa berujung pada praktik korupsi. “*Karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya karena enggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapa pun enggak ada,*” jelasnya. Penulis kemudian menggambarkan bagaimana permintaan THR ini semakin membebani wali kota dan kepala dinas, yang merasa tertekan dengan banyaknya permintaan menjelang Lebaran.

Pada bagian akhir, berita menyampaikan kebijakan tegas dari Dedi Mulyadi terkait ASN yang terbukti meminta THR. Ia mengancam akan langsung menonaktifkan mereka karena praktik tersebut termasuk pungutan liar. “*Proses, nonaktifkan,*” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Dedi tidak hanya melarang permintaan THR oleh ormas, tetapi juga memastikan bahwa pejabat pemerintah yang melakukan hal serupa akan dikenakan sanksi.

c. Berita 3 “*Jelang Lebaran, Dedi Mulyadi Tegaskan Dilarang Minta THR ke Pemda dan Perusahaan Swasta!*”

Berikut adalah analisis Super Struktur (Skematik) dari berita “*Jelang Lebaran, Dedi Mulyadi Tegaskan Dilarang Minta THR ke Pemda dan Perusahaan Swasta!*”. Berita ini dibuka dengan pernyataan tegas dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai larangan bagi siapa pun untuk meminta THR kepada lembaga pemerintahan maupun swasta. Pernyataan ini langsung menetapkan fokus utama berita, yaitu pentingnya menjaga integritas pejabat publik dan sektor usaha dari praktik pungutan yang tidak semestinya. Dalam paragraf berikutnya, berita menggambarkan bagaimana permintaan THR yang datang dari berbagai pihak kerap membuat kepala dinas dan wali kota merasa terbebani. Pernyataan “*tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing*” menunjukkan bahwa fenomena ini sudah menjadi kebiasaan yang cukup mengganggu setiap tahun menjelang Lebaran. Penulis berita juga mengutip pernyataan Dedi yang menjelaskan bahwa anggaran THR yang diterima pejabat pemerintah sejatinya hanya diperuntukkan bagi keluarga mereka, bukan untuk dibagikan kepada pihak luar.

Pada bagian tengah, berita menyoroti hubungan antara permintaan THR dan potensi korupsi. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa apabila pejabat pemerintah tetap memaksakan diri memberikan THR kepada pihak luar, mereka bisa tergoda untuk mengambil dana dari sumber

yang tidak seharusnya. Hal ini ditekankan dalam kutipan “*karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya*”, yang memperjelas bahwa tindakan ini dapat membuka celah praktik penyalahgunaan anggaran. Penulis berita kemudian menguatkan argumen tersebut dengan menyertakan pernyataan Dedi yang menegaskan bahwa tidak ada pos anggaran khusus untuk pembagian THR kepada ormas, LSM, atau kelompok lainnya. Pernyataan ini mempertegas bahwa permintaan THR oleh pihak luar bukan hanya membebani pejabat, tetapi juga berpotensi menyalahi aturan keuangan daerah. Berita kemudian ditutup dengan pernyataan Dedi yang menegaskan bahwa anggaran pemerintah daerah seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Struktur berita ini mengikuti pola yang runtut, dimulai dengan pernyataan utama, diikuti dengan pembahasan dampaknya terhadap pejabat pemerintah, analisis risiko korupsi, hingga penegasan ulang mengenai aturan anggaran. Penyajian berita dibuat dengan gaya bahasa yang lugas dan langsung pada inti permasalahan, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang ingin disampaikan.

d. Berita 4 “*Gubernur Jabar Bakal Tindak Tegas Oknum yang Minta THR ke Pejabat dan Pengusaha*”

Analisis Super Struktur (Skematik) dari berita “*Gubernur Jabar Bakal Tindak Tegas Oknum yang Minta THR ke Pejabat dan Pengusaha*”. Berita ini dibuka dengan penyampaian langsung mengenai kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun pihak lain untuk meminta THR kepada pejabat pemerintah dan pengusaha. Pernyataan ini menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya dianggap membebani, tetapi juga akan ditindak tegas jika tetap terjadi. Dengan pernyataan ini, penulis berita langsung membangun kesan bahwa tindakan meminta THR bukan hanya sekadar kebiasaan yang salah, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi serius.

Pada bagian berikutnya, berita mengembangkan informasi dengan mengutip pernyataan Dedi Mulyadi yang menggambarkan kondisi para pejabat pemerintahan menjelang Lebaran. “*Tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing*”, adalah kutipan yang menegaskan bahwa permintaan THR dari berbagai pihak kerap menjadi tekanan bagi pejabat daerah. Penulis kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bahwa pejabat sebenarnya hanya menerima THR untuk kebutuhan keluarga mereka sendiri. Pernyataan “*Kalau itu dibagikan, keluarganya nggak ada, terus mau ngambilnya dari pos mana?*” menyoroti bahwa jika pejabat menuruti permintaan tersebut, mereka berisiko mengalami kesulitan finansial atau bahkan mencari sumber lain yang tidak semestinya untuk memenuhi permintaan tersebut.

Selanjutnya, berita mengarah ke bagian yang lebih menekankan aspek hukum dan etika. Dedi Mulyadi mengaitkan permintaan THR dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Hal ini ditekankan dalam kutipan “*meminta THR kepada para pejabat perlu dihindari sebagai dukungan menciptakan pemerintahan yang antikorupsi*”, yang menunjukkan bahwa permintaan semacam itu bukan hanya sekadar tindakan tidak etis, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada bagian akhir, berita memperkuat gagasan bahwa tindakan meminta THR dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli). Pernyataan tegas “*Tindakan, itu pungli kategorinya*” yang diucapkan oleh Dedi menjadi klimaks dari berita ini, menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam jika praktik semacam itu terus berlanjut. Dengan menutup berita dengan pernyataan tegas mengenai konsekuensi hukum, penulis memperjelas bahwa isu ini bukan sekadar wacana, tetapi ada tindakan nyata yang akan diambil jika pelanggaran terjadi.

3. Analisis Struktur Mikro

a. Analisis Semantik Berita 1

Semantik dalam model analisis Van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal. Maksudnya adalah makna yang muncul merupakan hasil dari hubungan antar kalimat dan antar proposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu konstruksi wacana (Suciartini, 2017). Analisis semantik dalam model Van Dijk mencakup empat elemen utama diantaranya latar, detail, maksud, dan praanggapan, berikut ini analisis berita 1 “*Dedi Mulyadi Melarang Ormas Minta Jatah THR ke Pemerintah dan Pengusaha*”

a. Latar

Latar dalam wacana ini adalah situasi di mana terdapat maraknya laporan tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta THR kepada pemerintah dan pengusaha. Latar ini digunakan sebagai alasan pemberar bagi Dedi Mulyadi dalam mengeluarkan larangan terhadap praktik tersebut. Kutipan yang menunjukkan latar di berita satu sebagai berikut ini.

“Pernyataan itu muncul setelah maraknya laporan mengenai proposal yang mengatasnamakan ormas meminta THR.”

Dari kutipan ini, terlihat bahwa larangan Dedi Mulyadi didasarkan pada fakta adanya banyak laporan terkait praktik tersebut. Latar ini berfungsi untuk memperkuat argumentasi dalam wacana dan membentuk opini publik bahwa pemungutan THR oleh ormas adalah tindakan yang bermasalah.

b. Detail

Bagian detail dalam wacana ini menunjukkan bagaimana penulis berita mengontrol informasi dengan menjelaskan secara rinci larangan Dedi Mulyadi dan alasan di baliknya. Kutipan yang menunjukkan detail di berita satu sebagai berikut ini.

“Tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor manapun,” katanya dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Selasa (18/3/2025).”

“Karena nanti akan mengambil dari yang bukan peruntukannya. Karena enggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, enggak ada,” tandasnya.

Dari kutipan ini, terlihat bahwa Dedi Mulyadi secara spesifik menyebutkan bahwa tidak ada anggaran THR untuk ormas, sehingga praktik tersebut dianggap sebagai pungutan liar. Penggunaan detail ini memperkuat wacana bahwa pemungutan THR oleh ormas adalah tindakan yang tidak sah dan berpotensi korupsi.

c. Maksud

Maksud dalam wacana ini adalah mengajak masyarakat untuk menolak praktik pungli yang dilakukan oleh ormas dengan dalih THR. Kutipan yang menunjukkan maksud di berita satu sebagai berikut ini.

“Ya kan kalau kita ingin dukung antikorupsi, pemerintahan yang bersih, ya enggak boleh ada permintaan-permintaan THR menjelang Lebaran,” ucapnya.

Dari kutipan ini, terlihat bahwa tujuan utama larangan ini bukan hanya soal THR, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, ada juga maksud yang lebih tersirat dalam kutipan berikut:

“Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing sama karena orang datang ke kantor, semuanya minta THR.”

Di sini, maksud tersiratnya adalah bahwa pemungutan THR ini sudah menjadi kebiasaan yang merepotkan banyak pihak, terutama pejabat pemerintah, sehingga perlu dihentikan.

d. Praanggapan

Praanggapan dalam wacana ini adalah adanya anggapan bahwa meminta THR dari pemerintah dan pengusaha merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan bahwa pemungutan ini bisa mengarah pada praktik korupsi. Kutipan yang menunjukkan praanggapan di berita satu sebagai berikut ini.

“Jika dilanggengkan, Dedi mengatakan pemungutan tersebut berpotensi mengarah pada praktik korupsi lainnya.”

kutipan tersebut, tersirat praanggapan bahwa jika praktik ini terus dibiarkan, maka korupsi akan semakin berkembang. Dengan kata lain, penulis berita membentuk opini bahwa praktik pemungutan THR oleh ormas bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi merupakan bagian dari masalah korupsi yang lebih besar. Selain itu, ada juga praanggapan bahwa pejabat pemerintah sering kali terpaksa memberikan THR karena tekanan dari ormas:

“Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing sama karena orang datang ke kantor, semuanya minta THR.”

Kutipan ini mengandung praanggapan bahwa para pejabat mengalami tekanan dari ormas dan pengusaha terkait permintaan THR, yang menunjukkan bahwa praktik ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, meskipun sebenarnya bermasalah.

2. Analisis Semantik Berita 2

Semantik dalam model analisis Van Dijk merupakan makna lokal yang terbentuk dari hubungan antar kalimat dan antar proposisi dalam suatu wacana. Analisis semantik mencakup empat elemen utama, yaitu latar, detail, maksud, dan praanggapan. Berikut analisis berita berjudul *“Dedi Mulyadi: Ormas Tak Boleh Minta THR jika Ingin Pemerintah Bersih dari Korupsi”*.

a. Latar

Latar dalam berita ini adalah situasi di mana menjelang Lebaran, banyak organisasi masyarakat (ormas) yang meminta THR kepada pemerintah dan pengusaha. Kondisi ini menjadi alasan Dedi Mulyadi untuk mengeluarkan larangan terhadap praktik tersebut. Kutipan yang menunjukkan latar dalam berita sebagai berikut:

“Dedi mengungkapkan, banyak organisasi pemerintah (ormas) maupun perseorangan yang jelang Lebaran mendatangi kantor pemerintahan hanya untuk meminta THR.”

Dari kutipan ini, terlihat bahwa larangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa praktik ini sudah sering terjadi. Latar ini berfungsi untuk membentuk opini publik bahwa pemungutan THR oleh ormas merupakan masalah yang sudah berlangsung lama dan perlu dihentikan.

b. Detail

Detail dalam wacana ini menunjukkan bagaimana penulis berita mengontrol informasi dengan menjelaskan secara rinci larangan yang diberikan oleh Dedi Mulyadi serta alasan di baliknya. Kutipan berikut memperlihatkan hal tersebut:

“Saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor kemanapun,” tegas dia.

“Karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya karena enggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapa pun enggak ada.”

Dari kutipan ini, terlihat bahwa Dedi Mulyadi secara spesifik menyatakan bahwa tidak ada anggaran THR untuk ormas atau LSM, sehingga praktik ini dianggap sebagai pungli. Penggunaan detail ini memperkuat wacana bahwa pemungutan THR oleh ormas tidak memiliki dasar hukum dan dapat menimbulkan masalah lebih lanjut.

c. Maksud

Maksud dalam berita ini adalah untuk mengajak masyarakat agar menolak praktik pungli

yang dilakukan oleh ormas dengan dalih THR. Kutipan berikut menunjukkan maksud yang ingin disampaikan:

“Ya kan kalau kita ingin dukung antikorupsi, pemerintahan yang bersih, ya enggak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang Lebaran.”

Dari kutipan ini, terlihat bahwa larangan ini tidak hanya terkait dengan THR, tetapi juga bagian dari upaya untuk mencegah korupsi dalam pemerintahan. Selain itu, ada maksud tersirat dalam kutipan berikut:

“Orang datang ke kantor semuanya minta THR, sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya. Kalau itu dibagiin, keluarganya enggak ada, terus mau ngambilnya dari pos mana?”

Maksud tersirat dalam kutipan ini adalah bahwa permintaan THR ini sudah menjadi beban bagi pejabat pemerintah, yang jika dipenuhi dapat mengarah pada penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, berita ini ingin menekankan pentingnya menghentikan praktik tersebut demi menjaga integritas pemerintahan.

d. Praanggapan

Praanggapan dalam wacana ini adalah adanya asumsi bahwa meminta THR dari pemerintah dan pengusaha merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama serta berpotensi menimbulkan korupsi. Kutipan berikut menunjukkan praanggapan tersebut:

“Jika pejabat pemerintah tetap memaksakan diri memberikan THR ke ormas atau pihak lain, kata Dedi, justru dikhawatirkan akan melakukan tindakan korupsi.”

Dari kutipan ini, tersirat bahwa jika praktik ini terus berlangsung, maka korupsi bisa semakin berkembang. Dengan kata lain, berita ini membangun opini bahwa pemungutan THR oleh ormas bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga bagian dari permasalahan yang lebih besar. Selain itu, ada praanggapan lain dalam kutipan berikut:

“Dedi pun menyebut, wali kota hingga kepala dinas berbagai lembaga pemerintah belakangan dipusingkan dengan permintaan THR dari berbagai pihak.”

Kutipan ini mengandung praanggapan bahwa permintaan THR oleh ormas telah menjadi sesuatu yang wajar di masyarakat dan bahkan dianggap sebagai sebuah kewajiban, meskipun sebenarnya menimbulkan beban bagi pejabat pemerintah.

3. Analisis Semantik Berita 3

Analisis semantik dalam model Van Dijk mencakup empat elemen utama, yaitu latar, detail, maksud, dan praanggapan. Berikut analisis berita berjudul *“Jelang Lebaran, Dedi Mulyadi Tegaskan Dilarang Minta THR ke Pemda dan Perusahaan Swasta!”*.

a. Latar

Latar dalam berita ini adalah situasi menjelang Lebaran, di mana banyak pihak meminta THR kepada lembaga pemerintah maupun swasta, termasuk kepada pengusaha. Fenomena ini dijadikan alasan bagi Dedi Mulyadi untuk menegaskan larangan terhadap praktik tersebut. Kutipan yang menunjukkan latar dalam berita sebagai berikut:

“Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan pihak manapun tidak boleh meminta jatah Tunjangan Hari Raya (THR) kepada lembaga pemerintah ataupun swasta, termasuk ke pengusaha.”

Dari kutipan ini, dapat dilihat bahwa Dedi Mulyadi mengeluarkan pernyataan ini sebagai respons terhadap maraknya permintaan THR yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukan anggaran. Latar ini berfungsi untuk membentuk opini publik bahwa praktik tersebut adalah sesuatu yang bermasalah dan harus dihentikan.

b. Detail

Detail dalam berita ini digunakan untuk memperjelas alasan di balik larangan Dedi Mulyadi terkait permintaan THR oleh pihak tertentu. Kutipan berikut menunjukkan rincian yang diberikan:

“Karena orang datang ke kantor semuanya minta THR sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya kalau itu dibagiin, keluarganya nggak ada, terus mau ngambilnya dari pos mana,” tuturnya.

“Karena nggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun nggak ada.”

Dari kutipan ini, terlihat bahwa Dedi Mulyadi menekankan bahwa anggaran pemerintah tidak memiliki pos khusus untuk membagikan THR kepada kelompok tertentu. Dengan menyertakan detail ini, berita ingin memperkuat gagasan bahwa permintaan THR oleh pihak tertentu tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menimbulkan beban bagi pejabat pemerintah.

c. Maksud

Maksud dalam berita ini adalah untuk mengajak masyarakat agar tidak meminta THR kepada pemerintah atau pengusaha, karena praktik tersebut bisa berujung pada tindakan korupsi. Kutipan berikut menunjukkan maksud tersebut:

“Kalau kita ingin dukung anti-korupsi, pemerintahan yang bersih ya nggak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang lebaran, karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya.”

Dari kutipan ini, terlihat bahwa tujuan utama larangan ini bukan hanya untuk melarang permintaan THR, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, ada maksud tersirat dalam kutipan berikut:

“Oh sudah tegas deh, saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor kemanapun kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing, sama.”

Dari pernyataan ini, tersirat bahwa pejabat pemerintah merasa terbebani oleh permintaan THR yang datang dari berbagai pihak, sehingga larangan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan tersebut.

d. Praanggapan

Praanggapan dalam berita ini adalah adanya asumsi bahwa permintaan THR dari pemerintah dan pengusaha merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama serta dapat mengarah pada praktik korupsi. Kutipan berikut menunjukkan praanggapan tersebut:

“Dia pun menegaskan bahwa anggaran pemerintah daerah tidak pernah mencantumkan pembagian THR untuk kelompok tertentu. Sebab anggaran diperuntukkan untuk kebaikan masyarakat secara luas.”

Dari kutipan ini, tersirat bahwa jika praktik ini terus dibiarkan, maka dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat akan dialihkan kepada pihak yang tidak berhak. Selain itu, ada praanggapan lain dalam kutipan berikut:

“Oh sudah tegas deh, saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor kemanapun kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing, sama.”

Pernyataan ini mengandung praanggapan bahwa pejabat pemerintah kerap mengalami tekanan dari berbagai pihak terkait permintaan THR, yang menunjukkan bahwa praktik ini sudah dianggap wajar meskipun seharusnya tidak terjadi.

4. Analisis Semantik Berita 4

Analisis semantik dalam model Van Dijk mencakup empat elemen utama, yaitu latar, detail, maksud, dan praanggapan. Berikut analisis berita berjudul *“Gubernur Jabar Bakal Tindak Tegas Oknum yang Minta THR ke Pejabat dan Pengusaha”*.

a. Latar

Latar dalam berita ini adalah kondisi menjelang Lebaran, di mana terdapat fenomena permintaan THR dari oknum organisasi kemasyarakatan (Ormas) kepada pejabat pemerintah, pengusaha, dan badan usaha. Kutipan yang menunjukkan latar dalam berita ini adalah:

“Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa oknum organisasi kemasyarakatan (Ormas) dilarang melakukan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) ke toko, pengusaha, badan usaha, dan pejabat pemerintahan.”

Dari kutipan ini, terlihat bahwa latar yang melatarbelakangi pernyataan Dedi Mulyadi adalah adanya praktik permintaan THR oleh Ormas yang dianggap merugikan pejabat dan pengusaha. Latar ini berfungsi untuk membentuk opini bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar dan perlu dihentikan.

b. Detail

Bagian detail dalam berita ini menunjukkan bagaimana informasi disajikan secara lebih spesifik terkait dampak dari permintaan THR kepada pejabat dan pengusaha. Kutipan berikut memberikan rincian tersebut:

“Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing sama.”

“Kalau itu dibagikan, keluarganya nggak ada, terus mau ngambilnya dari pos mana?” kata Dedi.

Dari kutipan ini, terlihat bahwa permintaan THR oleh oknum tertentu menimbulkan beban bagi pejabat, karena mereka hanya menerima THR dari pemerintah untuk keperluan pribadi dan keluarga mereka. Dengan menghadirkan detail ini, berita memperkuat gagasan bahwa praktik tersebut tidak hanya membebani pejabat, tetapi juga dapat mengarah pada penyalahgunaan anggaran.

c. Maksud

Maksud utama dalam berita ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa meminta THR dari pejabat dan pengusaha merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan serta berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar (pungli). Kutipan berikut memperjelas maksud tersebut:

“Menurutnya, meminta THR kepada para pejabat perlu dihindari sebagai dukungan menciptakan pemerintahan yang antikorupsi.”

Dari kutipan ini, terlihat bahwa larangan tersebut tidak hanya terkait dengan permasalahan THR semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan menjaga integritas pemerintahan. Maksud tersirat juga terlihat dalam kutipan berikut:

“Tindakan, itu pungli kategorinya,” tegas Dedi.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa maksud dari pernyataan Dedi Mulyadi adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa meminta THR bukanlah hal yang wajar, melainkan sudah masuk dalam tindakan ilegal yang bisa ditindak secara hukum.

d. Praanggapan

Praanggapan dalam berita ini adalah adanya anggapan bahwa meminta THR dari pejabat dan pengusaha merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan bahwa praktik ini bisa dikategorikan sebagai pungutan liar. Kutipan berikut menunjukkan praanggapan tersebut:

“Pasalnya, kata dia, tidak ada mata anggaran untuk pembagian THR kepada oknum-oknum.”

Dari kutipan ini, tersirat bahwa jika praktik ini terus berlangsung, maka dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bisa saja disalahgunakan untuk memenuhi

permintaan THR dari pihak yang tidak berhak. Selain itu, ada juga pranggapan bahwa pejabat pemerintah kerap mengalami tekanan dalam menghadapi permintaan THR:

“Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing sama.”

Dari kutipan ini, terlihat bahwa permintaan THR dari oknum tertentu sudah menjadi sesuatu yang biasa terjadi menjelang Lebaran, meskipun sebenarnya praktik ini membebani pejabat dan dianggap tidak sah.

KESIMPULAN

Analisis wacana kritis merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan teks dalam konteks sosial, kognisi, dan ideologi tertentu. Menurut Teun A. Van Dijk, terdapat tiga aspek utama dalam analisis wacana kritis, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Struktur dimensi teks mencakup struktur makro, yang menyoroti tema utama dalam berita; superstruktur, yang mengkaji skema penyajian teks; serta struktur mikro, yang menganalisis pemilihan kata, kalimat, dan strategi bahasa yang digunakan.

Berdasarkan analisis terhadap keempat berita yang membahas larangan permintaan THR oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ditemukan bahwa teks berita berhasil menyoroti kebijakan ini sebagai langkah dalam menegakkan integritas pemerintahan dan mencegah praktik pungutan liar. Melalui penyajian fakta yang jelas dan kutipan langsung dari Dedi Mulyadi, berita-berita ini memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Struktur wacana yang sistematis, strategi penyajian yang mempertegas urgensi kebijakan, serta penggunaan bahasa yang lugas dan tegas berkontribusi pada efektivitas berita dalam menyampaikan pesan kepada pembaca.

Dengan pendekatan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk, dapat dipahami bahwa berita ini tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kebijakan larangan permintaan THR, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan politik, termasuk upaya pemerintah dalam menegakkan aturan yang lebih transparan dan bebas korupsi. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam analisis ini menunjukkan bagaimana teks berita diproduksi dan bagaimana ia mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai fenomena sosial yang diberitakan

PENGAKUAN/ ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Agus Hamdani, M.Pd., selaku Ketua Program Studi dan Dosen Mata Kuliah Analisis Wacana Kritis, yang telah memberikan bimbingan, wawasan, serta arahan yang berharga dalam penyusunan jurnal ini. Dukungan dan ilmu yang diberikan telah menjadi fondasi penting dalam memahami serta menerapkan teori Analisis Wacana Kritis, khususnya dalam perspektif Teun A. Van Dijk.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Asep Nurjamin, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut, atas dukungan akademik dan motivasi yang diberikan selama proses penelitian ini. Arahan serta kebijakan yang beliau tetapkan telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan mendalami kajian akademik ini dengan lebih optimal.

Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan jurnal ini, baik dalam bentuk dukungan moral, penyediaan sumber referensi, maupun diskusi akademik yang memperkaya pemahaman penulis. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Analisis Wacana Kritis.

DAFTAR REFERENSI

- Adetunji, A. (2006). *Inclusion and exclusion in political discourse: Deixis in Olusegun Obasanjo's speeches*. Journal of Language and Linguistics. 5(2), Hal. 177-191.
- Albaburrahim. (2017). *Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Kasus Papa Minta Saham Di Metro TV. Lingua Franca*. Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, 5 (2), Hal 1-12.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Badara A. (2012). *Analisis Wacana, Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Media*. Kencana Prenada Media Group.
- Baryadi, P. (2002). *Dasar-dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Gondhosuli.
- Brown, G & Yule, G. (1984). *Discourse Analysis*. Cambridge University Press.
- Coulthard M. (1979). *An Introduction to Discourse Analysis*. Longman.
- Darma, Y. A. (2009). *Analisis wacana kritis*. Yrama Widya bekerja sama dengan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (FPBS UPI). <https://books.google.co.id/books?id=S63dSAAACAAJ>
- Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (N. Huda (ed.); VII). LKiS.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Percetakan Lkis.
- Harimurti, K. (2008). *Kamus Linguistik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hermina. (2014). *Analisis Wacana Berita KisahKisah Dari Perbatasan Negara (Liputan Khusus Edisi Minggu 12 Juni 2011 Kaltim Post)*. Ejurnal Ilmu Komunikasi, 2(3), 229–243. <https://ejurnal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/?p=1537>
- Hermina. (2014). *Analisis Wacana Berita KisahKisah Dari Perbatasan Negara (Liputan Khusus Edisi Minggu 12 Juni 2011 Kaltim Post)*. Ejurnal Ilmu Komunikasi, 2(3), 229–243. <https://ejurnal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/?p=1537>
- Humaira, H. W. (2018). *Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Teun A. Van Dijk pada Pemberitaan Surat Kabar Republika*. Literasi, 2(1), 32–40. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/literasi/article/view/951>
- Imam, A. F. (2012). *Analisis Wacana Van Dijk Pada Lirik Lagu Irgaa Tani (My Heart Will Go On)*. Journal Of Arabic Learning And Teaching, 1 (1) . Hal. 1-8.
- Jørgensen, M., & Phillips, L. J. (2007). *Analisis wacana: teori & metode*. Pustaka Pelajar. <https://books.google.co.id/books?id=uPWkQwAACAAJ>
- Kridalaksana, H. (2013). *Kamus Linguistik (Edisi Keempat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lado, C. R. (2014). *Analisis Wacana Kritis Program Mata Najwa "Balada Perda" Di Metro TV*. Jurnal E-Komunikasi, 2 (2). Dirujuk dari <http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/1777>
- Lukman. (2006). *linguistik indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=lC9-4t30-esC>
- Purwoko, H. (2008). *Discourse Analysis (Kajian Wacana bagi Semua Orang)*. Jakarta: PT. Indeks
- Rahimi, F. dan M. J. R. (2011). *Critical Discourse Analysis: Scrutinizing Ideologically-Driven Discourses*. International Journal of Humanities and Social Science, 1(16). <http://www.ijhssnet.com/journal/index/526:vol-1-no-16-november2011abstract13&catid=16:journal-abstract>
- Rashidi N dan Souzandehfar M. (2010). *A Critical Discourse Analysis Of The Debates Between Republicans And Democrats Over The Continuation Of War In Iraq*. Journal of Linguistic and Intercultural Education, 3. https://www.researchgate.net/profile/Dr_M

- everhuber/publication/343088810_Active_listening_as_a_key_competence_in_intercultural_communication_education_-an_academic_classroom_example_with_conceptual_and_theoretical_embedding/links/5fbe8439a6fdcc6cc6689f93.
- Suciartini, N. N. A. (2017). ANALISIS WACANA KRITIS “SEMUA KARENA AHOK” PROGRAM MATA NAJWA METRO TV. *Aksara*, 29(2), 267–282.
- Sumarlam. (2019). *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Jakarta: Buku Katta.
- Suwandi, S. (2008). *Serbalinguistik*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.